



Integritas (SPI) KPK di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Tujuan dari kegiatan ini adalah mendukung percepatan Reformasi Birokrasi yang berintegritas, bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta memetakan risiko korupsi dan mengevaluasi kemajuan pencegahan korupsi di berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, pada Rabu (16/10/24).

Zoom Meeting tersebut dilaksanakan di ruang sekretariat WBK, diikuti oleh pejabat struktural Lapas Karanganyar. SPI dijelaskan memiliki peran penting dalam mengidentifikasi area rawan korupsi sekaligus menjadi dasar untuk memperbaiki program pencegahan korupsi di masa mendatang. Mengingat survei SPI hanya tersisa 12 hari, seluruh jajaran eselon I diharapkan mampu menyosialisasikan pentingnya pengisian survei ini kepada seluruh pegawai melalui berbagai media seperti website, media sosial, dan QR code terbaru yang disediakan, agar target responden sesuai arahan KPK dapat tercapai.

Indeks SPI menjadi penting karena berkaitan langsung dengan nilai Reformasi Birokrasi Kemenkumham, yang mencerminkan performa kementerian secara keseluruhan. Oleh sebab itu, diharapkan seluruh pegawai aktif berpartisipasi dalam survei ini dan melaporkan kepada atasan jika menerima undangan pengisian survei dari KPK melalui WhatsApp atau email. Meskipun ada rencana pemisahan Kementerian Hukum dan HAM, target kinerja hingga akhir 2024 tetap harus dijalankan, termasuk perjanjian kinerja dan indikator kinerja yang tetap berlaku hingga Desember.

Pada kegiatan tersebut juga disampaikan langkah-langkah teknis pengisian survei melalui QR code, di mana responden melakukan scan, melengkapi data diri, dan menyatakan kesediaan sebagai responden melalui formulir yang disediakan oleh KPK. Setelah diverifikasi, responden dapat langsung mengisi survei terkait peningkatan penegakan anti korupsi di lingkungan Kemenkumham.

Kegiatan diakhiri dengan presentasi cara memantau rekapitulasi data responden melalui website resmi KPK di <https://spi2024-perolehan.kpk.go.id/>. Diharapkan, seluruh pegawai dapat berpartisipasi dalam survei ini untuk mendukung peningkatan indeks Reformasi Birokrasi Kemenkumham serta menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi.